

PENGARUH KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi Kasus Pada Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018-2022)

Sultan Wahyu Akbar

NPP. 31.0759

Asdaf Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email: sultanwa035@gmail.com

Dr. Anindita Primastuti, S.E, M.E

Email: anindita@ipdn.ac.id

ABSTRACT (in English)

(Problem Statement/Background (GAP): Issues related to regional financial management in Sumbawa Regency are very important, because regional financial capacity and independence are still relatively low and concerning. Considering that regional finance is used as financing for regional development. The annual increase in PAD (Regional Original Income) is not accompanied by a positive economic growth trend in Sumbawa Regency. Despite the consistent rise in PAD, economic growth remains stagnant. **Purpose:** the purpose of this study was to examine and analyze the influence between regional financial capacity and independence and its effect on economic growth in Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara Province, for the 2011-2022 fiscal year. **Method:** The method used in this research is a quantitative and qualitative research approach (Mixed Method) with secondary data sources namely Realization of Budget Reports (LRA) and Economic Growth Data, then primary data sources namely interviews. **Result:** Based on the results of this study where the author analyzes the results of the F test, where the calculated F value is 110.331 exceeds the F table value of 19.00 ($110.331 > 19.00$), and the significance value is 0.042 lower than the threshold of 0.05 then regional financial capability and regional financial independence have a significant simultaneous effect on economic growth and the results of the t-test also proven to have a significant partial effect. These conclusions are supported by the regression coefficient values of multiple linear regression of 4.890 for regional financial capability and regional financial independence of 4.193 and economic growth of 3.859. While the coefficient of determination is 95.8%. Based on the results of the analysis from the data collection and interviews in this research, it shows that the regional financial capability in Sumbawa Regency for the past 5 years (2018-2022) has not fully supported regional autonomy and can be said to be not yet independent. This is caused by several main factors, namely the decline in economic activities in the tourism, trade and services sectors, dependence on Transfer Funds, and suboptimal budget management efficiency. Efforts that have been made by the Sumbawa Regency Regional Financial and Asset Management Agency to overcome this problem, such as utilizing local economic potential, increasing socialization and education to the community, optimizing regional tax and retribution potential, and careful budget planning. **Conclusion:** Based

on the partial test of variables between regional financial capacity (X1) on economic growth (Y) it is proven to have an effect, and between blood financial independence (X2) 2 on economic growth (Y) also has a positive effect and imultaneously between regional financial capabilities (X1) and regional financial independence (X2) on economic growth (Y) has a positive and significant effect.

Keywords: Ability, Independence, Regional Finance, Economy

ABSTRAK (in Bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sumbawa menjadi suatu hal yang sangat penting, karena kemampuan dan kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah dan memperhatikan. Mengingat keuangan daerah digunakan sebagai pembiayaan pembangunan daerah. Peningkatan PAD yang terjadi setiap tahun ternyata tidak dibarengi dengan kondisi pertumbuhan ekonomi dikabupaten sumbawa, yang mana PAD yang terus meningkat setiap tahunnya namun tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak meningkat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemampuan dan kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa serta mengidentifikasi dan mendeskripsikan kemampuan keuangan daerah di kabupaten sumbawa yang belum sepenuhnya mampu mendukung otonomi daerah. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif (Mixed Method) dengan sumber data skunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Data Pertumbuhan Ekonomi, kemudian sumber data primer yaitu wawancara. **Hasil:** Berdasarkan hasil temuan dimana penulis menganalisis hasil uji F, dimana nilai F hitung sebesar 110,331 melampaui nilai F tabel sebesar 19,00 ($110,331 > 19,00$), dan nilai signifikansi sebesar 0,042 lebih rendah dari ambang batas sebesar 0,05 maka kemampuan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi dan hasil uji t terbukti berpengaruh signifikan secara parsial. Kesimpulan tersebut didukung dengan dengan nilai dari pengaruh regresi linier berganda sebesar 4,890 untuk kemampuan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah sebesar 4,193 dan nilai konstanta sebesar 3,859. Sedangkan nilai koefisien determinasinya sebesar 95,8%. Berdasarkan hasil analisis dari pengumpulan data dan wawancara dipenelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Sumbawa selama 5 tahun terakhir (2018-2022) belum sepenuhnya mendukung otonomi daerah dan dapat dikatakan belum mandiri. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama yaitu penurunan aktivitas ekonomi disektor pariwisata, perdagangan dan jasa, ketergantungan pada dana transfer serta efisiensi pengelolaan anggaran yang belum optimal. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa untuk mengatasi masalah ini, seperti memanfaatkan potensi ekonomi lokal, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah, serta perencanaan anggaran yang matang. **Kesimpulan:** Berdasarkan uji variabel secara parsial antara kemampuan keuangan daerah (X1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) terbukti berpengaruh, dan antara kemandirian keuangan darah (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) juga berpengaruh positif serta secara simultan antara kemampuan keuangan daerah (X1) dan kemandirian keuangan daerah (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) berpengaruh positif dan signifikan.

Kata Kunci: Kemampuan, Kemandirian, Keuangan Daerah, Ekonomi

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perekonomian pemerintahan daerah dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi yang merupakan tingkat kenaikan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada tahun yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menyatakan perkembangan, kemakmuran dan kemajuan ekonomi serta perubahan yang fundamental (Hera dkk., 2021). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ditandai dengan penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai daerah otonom. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat menjadi instrumen penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah.

Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah selain melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah juga adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kini telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Implementasi dari adanya Undang-Undang tersebut, menjadikan pemerintah daerah sebagai pemeran penting untuk pelaksanaan pembangunan di daerah terutama dalam pengelolaan keuangan dan ekonomi daerah seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah daerah akan bertanggung jawab penuh atas keadaan perekonomian di daerahnya.

Keberhasilan keuangan merupakan indikator penting dalam rangka terselenggaranya pemerintah daerah. Semakin besar pengelolaan atas potensi yang dimiliki pemerintah daerah maka, akan semakin besar juga peluang pendapatan yang akan dihasilkan. Ciri utama suatu daerah dikatakan mampu dalam melaksanakan otonomi di daerahnya terlihat pada kemampuan keuangan daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah (R. Agoes Kamaroellah, 2017). Kemampuan daerah dalam hal ini memiliki arti bahwa bagaimana suatu daerah dapat menggali sumber potensi yang ada sehingga menjadi pendapatan daerah dan dapat mendanai kebutuhan dalam pelaksanaan otonomi daerah tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat. Salah satu yang menjadi kriteria dalam mendukung hal tersebut yaitu melalui *self-supporting* di bidang keuangan.

Kemandirian menggambarkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana bantuan dari pihak eksternal. Semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah, maka ketergantungan daerah terhadap bantuan eksternal seperti pemerintah pusat dan provinsi akan semakin rendah (Ramli Faud, 2016:32). Keuangan pemerintah daerah yang mandiri dan pengelolaannya tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang dijadikan sebagai acuan dalam pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang berguna

sebagai pengambilan keputusan dalam hal pembangunan, melalui APBD juga dapat diketahui apakah suatu daerah bisa melaksanakan pembangunannya dengan akuntabel dan mengedepankan transparansi.

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik akan diikuti dengan terpenuhinya pembiayaan pembangunan pemerintah daerah yang salah satunya dapat dilihat dari kemampuan dan kemandirian keuangan daerah, untuk mewujudkan hal tersebut yaitu melalui pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua hak yang diterima daerah melalui pungutan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah sah.

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Diketahui bahwa Kabupaten Sumbawa memiliki berbagai potensi yang sangat beragam mulai dari pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sangat diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah, karena PAD juga merupakan indikator pencapaian pembangunan daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah otonom. Pembangunan di daerah Kabupaten Sumbawa memerlukan biaya yang tidak sedikit hingga bisa meningkatkan pengeluaran pemerintah. Dalam rangka memenuhi pengeluaran pemerintah daerah, membuat Kabupaten Sumbawa perlu menggunakan sumber potensi daerah yang tersedia sehingga, tidak secara penuh mengandalkan dana dari pemerintah pusat dan pada akhirnya juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kabupaten Sumbawa mengalami kondisi yang fluktuatif terhadap kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menggambarkan kenaikan dan penurunan yang tidak stabil setiap tahunnya dengan rincian pada tahun 2018 sebesar Rp 143,94 M, tahun 2019 sebesar Rp 163,93 M, tahun 2020 sebesar Rp 181,31 M, di tahun 2021 sebesar Rp 202,86 M, tahun 2022 sebesar Rp 172,07.

Rata-rata kenaikan PAD Kabupaten Sumbawa selama lima tahun terakhir yaitu sebesar Rp 172,822 M. Peningkatan PAD ini dipengaruhi oleh penerimaan dari sektor-sektor unggulan di Kabupaten Sumbawa seperti pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan. Seiring dengan meningkatnya penerimaan PAD membuktikan bahwa PAD Kabupaten Sumbawa akan memiliki peluang terus meningkat pada tahun-tahun yang akan datang. Terlihat PAD Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut.

Tabel 1.
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2022

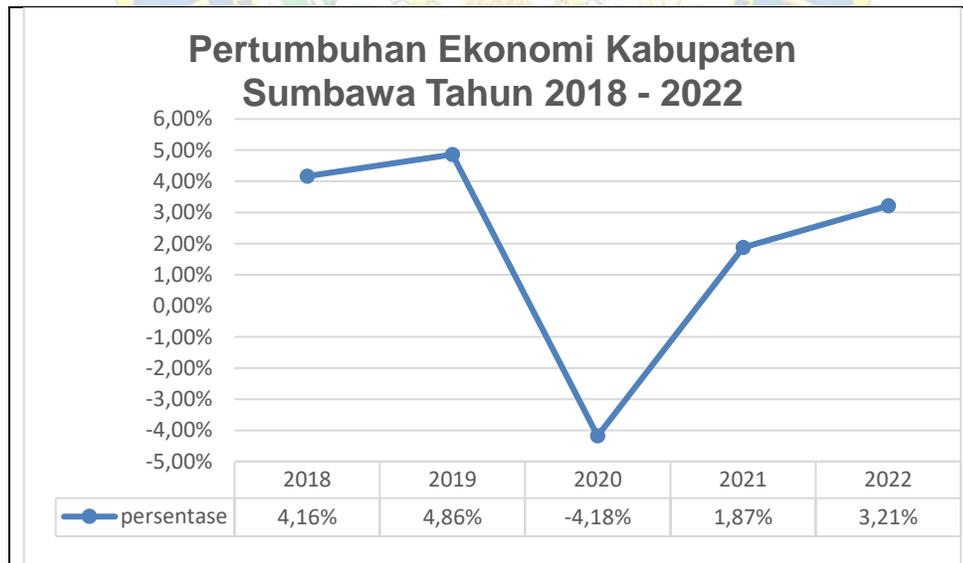
(Dalam Miliaran Rupiah)

No	Pendapatan Asli Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pajak Daerah	35,59	37,54	31,83	36,26	42,88
2	Retribusi Daerah	17,90	10,51	8,50	8,56	9,32
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14,18	11,75	13,06	9,91	11,02
4	Lain-Lain PAD Yang Sah	76,28	104,14	127,91	148,13	108,85
Jumlah PAD		143,94	163,93	181,31	202,86	172,07

Sumber: DJPK. Kementerian Keuangan (2022)

Perkembangan dari pertumbuhan ekonomi, merupakan perkembangan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu daerah. Pertumbuhan perekonomian akan menggambarkan seberapa besar pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, namun dalam hal ini, ada banyak dari indikator yang mempengaruhi perekonomian daerah, misalnya pendapatan nasional, kesejahteraan masyarakat, kemiskinan dan pengeluaran pemerintah. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa selama dua belas tahun terakhir Kabupaten Sumbawa terhitung dari tahun 2011-2022, terkait dengan kenaikan dan penurunan yang terjadi tergambar dalam gambar grafik di bawah ini.

Gambar 1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa (2022)

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang terjadi setiap tahun ternyata tidak dibarengi dengan kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa, yang mana dengan PAD yang terus meningkat setiap tahunnya namun diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak meningkat. Maka dari itu, Kabupaten Sumbawa masih harus dipertanyakan tingkat kemampuan dan kemandirian keuangan daerahnya dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kemampuan dan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumbawa tercermin didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa pada tahun yang sudah terealisasi. Sedangkan, dalam rangka mengukur pertumbuhannya dapat dilihat melalui PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terhadap harga konstan pada Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk menganalisis kemampuan dan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Sumbawa sebagai tahap lanjutan dari pendapatan daerah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 serta melihat bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun yang bersangkutan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam segi konteks untuk melihat seberapa besar hubungan antara kemampuan dan kemandirian keuangan daerah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2022. Penelitian Choiroel Woestho, Ari Sulistyowati, dan Rycha Kuwara berjudul Analisis Kemampuan dan Kemandirian keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Joneponto, menemukan bahwa kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah, berkisar antara 0% hingga 25%, dengan kecenderungan pola ketergantungan pada sumber eksternal. Sementara itu, kemampuan keuangan daerah juga menunjukkan tingkat yang sangat kecil, berkisar antara 0% hingga 10% (Woestho, Sulistyowati, et al., 2020). Dalam regresi linier berganda, uji-t dan uji F menegaskan bahwa baik kemandirian keuangan daerah maupun kemampuan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada tahun penelitian dan lokasi penelitian.

Mutia Ayustin (2018) dengan judul “Kemandirian Keuangan Daerah Yang Dipengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2015-2017 (Pada Badan Pusat Statistik Jawa Barat)”, dimana hasil yang didapatkan yaitu rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah berada pada kategori masih rendah, dengan kemandirian keuangan terendah yaitu Kabupaten Pangandaran dengan persentase 52,4%. Sedangkan yang tertinggi sebesar 536,09%. Krest D. Tolosang (2018) yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon, menemukan bahwa Pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara Bersama sama pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan.

Penelitian Tri Utari Handayani dan Erinos (2020) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah

dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variable Moderating (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2018), menemukan bahwa Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, meskipun pengaruhnya hanya sebesar 8,1%. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, dan pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah.

Jalu Aji Prakoso, Fitrah Sari Islami, Rr Retno Sugiharti (2019) yang berjudul Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Jawa Tengah dalam penelitiannya menemukan bahwa Kemampuan keuangan daerah di Jawa Tengah sebagian besar berada pada kategori sangat kurang dan kemandirian keuangan daerahnya dalam kategori instruktif serta kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan antara kemandirian keuangan daerah terhadap kemiskinan memiliki pengaruh negatif signifikan sebesar -1.2541.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan penulis yaitu menggunakan variabel kemampuan dan kemandirian keuangan daerah serta pertumbuhan ekonomi selama rentan waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2018-2022, serta untuk pertumbuhan ekonominya penulis menggunakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan. Penulis menggunakan indikator yang berbeda dengan penelitian terdahulu karena menurut penulis PDRB atas harga konstan lebih cocok digunakan dalam penelitian *time series*. Tahun penelitian yang digunakan juga merupakan tahun terbaru dengan memasukkan tahun 2022 dan menggunakan pendekatan tambahan yaitu kualitatif didalamnya yang mana tehnik pengumpulannya menggunakan wawancara dengan pihak terkait.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara kemampuan dan kemandirian keuangan daerah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi kemudian dikuatkan dengan mengidentifikasi dan mendeskripsikan kemampuan keuangan daerah yang belum sepenuhnya mampu mendukung otonomi daerah di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2018-2022.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mix method* atau pendekatan campuran yaitu kuantitatif yang dikuatkan dengan pendekatan kualitatif yang dimana *Mix Method* adalah suatu pendekatan yang mengintegrasikan data kualitatif dan kuantitatif dalam semua tahap penelitian, mulai dari perencanaan hingga interpretasi, untuk memahami fenomena secara lebih holistik. Penulis mengumpulkan data melalui dokumentasi. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa data laporan keuangan dan ekonomi Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2018-2022. Data laporan keuangan diperoleh

dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumbawa. Data laporan yang diperlukan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang telah diaudit dan data pertumbuhan ekonomi tahun 2018-2022 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa. Kemudian dikuatkan dengan pengumpulan data dan informasi dari wawancara dengan perwakilan BKAD Kabupaten Sumbawa untuk menguatkan hasil analisis kuantitatif sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan statistik dengan alat bantu *software* berbentuk aplikasi statistik (aplikasi SPSS 26) dalam menghitung data dalam penelitian, dalam penelitian kuantitatif ini analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut.

3.1 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa

Kemampuan keuangan daerah (Derajat Desentralisasi Fiskal) yaitu tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembiayaan daerah yang berkaitan dengan pembangunan daerah ataupun pembiayaan lainnya. Adapun kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{(\text{PAD})} \times x$$

Sumber: (*Penangsang et al., 2022*)

Perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa menggunakan rumus dari teori Jalu Aji dkk selama sembilan tahun terakhir yaitu dari tahun 2011-2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.

Perhitungan Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018-2022

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Miliar Rupiah)	Pendapatan Daerah (Miliar Rupiah)	Kemampuan Keuangan (DDF (%))	Pola Hubungan
1	2018	143,95	1.604,62	8,971	Sangat Kurang
2	2019	163,93	1.782,26	9,198	Sangat Kurang
3	2020	181,31	1.630,12	11,123	Kurang

4	2021	202,86	1.641,09	12,361	Kurang
5	2022	163,15	1.675,68	9,736	Sangat Kurang

Sumber: BPKAD Kabupaten Sumbawa (data diolah, 2023)

Jika dikaitkan dengan skala interval atau pola hubungan dari kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa, sesuai yang dikemukakan oleh Jalu Aji dkk (2019) maka kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa dapat diklasifikasikan menurut interval yang telah ditentukan. Perhitungan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018-2022 terlihat mengalami peningkatan dan penurunan yang signifikan. Pada tahun tahun 2018 nilai rasio kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa mencapai 8,971% termasuk dalam interval 0,00-10,00 dengan pola hubungan sangat kurang, tahun 2019 sebesar 9,198% termasuk dalam interval 0,00-10,00 dengan pola hubungan sangat kurang juga, tahun 2020 mencapai 11,123% termasuk dalam interval 10,01-20,00 dengan pola hubungan kurang, di tahun 2021 nilai rasionya sebesar 12,361% termasuk dalam interval 10,01-20,00 dengan pola hubungan kurang juga, namun tahun 2022 justru mengalami penurunan sebesar 9,736% dan termasuk dalam interval 0,00-10,00 dengan pola hubungan sangat kurang.

3.2 Analisis Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan (Derajat Otonomi Fiskal) daerah digunakan untuk melihat kemampuan keuangan daerah dalam rangka membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya dan pelayanan kepada masyarakat diluar bantuan dari pihak eksternal seperti pemerintah pusat dan provinsi (Syafnita, 2021). Adapun kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumbawa dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DOF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah}} \times x$$

Sumber: (*Penangsang et al., 2022*)

Perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumbawa menggunakan rumus dari teori Amrie Firmansyah dkk dari tahun 2011-2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.
Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2011-2022

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi	Kemandirian Keuangan (DOF(%))	Pola Hubungan
1	2018	143,94	1.401,66	10,269	Instruktif
2	2019	163,93	1.553,68	10,551	Instruktif
3	2020	181,31	1.229,28	14,749	Instruktif

4	2021	202,86	1.363,71	14,875	Instruktif
5	2022	163,15	1.406,83	11,597	Instruktif

Sumber: BPKAD Kabupaten Sumbawa (data diolah, 2023)

Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumbawa terlihat bahwa angka rasio cenderung tidak stabil setiap tahunnya. Pada tahun 2018 nilai rasionya sebesar 10,269%, tahun 2019 yaitu sebesar 10,551%, tahun 2020 mengalami peningkatan signifikan sebesar 14,749%, tahun 2021 nilai rasionya sebesar 14,875%, tahun 2022 justru mengalami penurunan menjadi sebesar 11,597%.

Skala interval dari pengklasifikasian nilai kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumbawa dari tahun 2018-2022 memiliki klasifikasi skala interval yang sama yaitu termasuk dalam skala interval 0-25 dengan pola hubungan yang instruktif. Randria Ramadhani (2016) menjelaskan bahwa pola hubungan instruktif ini adalah pola hubungan yang memperlihatkan keterkaitan antara pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah masih sangat tinggi dibuktikan dengan pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan dengan kemandirian pemerintah daerah itu sendiri dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya yang mana masih bergantung pada bantuan dari pihak eksternal seperti pemerintah pusat dan provinsi.

3.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumbawa

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh kegiatan unit ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu daerah terhadap harga berlaku. Nilai PDRB memiliki kaitan yang erat dengan pendapatan per kapita masyarakat dan nilai PDRB dapat digunakan untuk menilai tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, PDRB yang digunakan dalam melihat pengaruh antara variabel independen dan dependen dalam penelitian ini yaitu PDRB atas harga konstan Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018-2022. Menghitung persentase dari pertumbuhan ekonomi melalui perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan dengan metode produksi dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$Y_{it} = \frac{PDRB_{it} - PDRB_{it-1}}{PDRB_{it-1}} \times 100\%$$

Sumber: Woestho dkk., 2020

Keterangan:

Yit = Pertumbuhan Ekonomi

PDRBit = Produk Domestik Regional Bruto tahun i

PDRBit-1 = Produk Domestik Regional Bruto tahun i – 1

Adapun nilai PDRB atas harga konstan Kabupaten Sumbawa pada tahun 2011-2022 dalam bentuk persentase dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4
Persentase Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sumbawa
Tahun 2018-2022

No	KATEGORI	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.32	2.01	-0.82	1.32	-4,0
2	Pertambangan dan Penggalian	3.70	8.90	-7.61	1.73	38,2
3	Industri Pengolahan	3.06	3.58	-0.85	1.30	2,2
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2.45	19.60	12.45	8.91	6,9
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-1.26	0.62	0.28	0.43	2,5
6	Konstruksi	2.22	11.93	-18.83	5.31	289,0
7	Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.49	6.45	-2.86	1.24	4,4
8	Transportasi dan Pergudangan	4.08	3.88	-29.56	0.59	13,1
9	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	0.94	2.69	-18.63	0.42	22,9
10	Informasi dan Komunikasi	5.93	4.13	10.79	4.26	3,2
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7.53	1.40	6.42	0.94	5,1
12	Real Estat	4.21	2.94	0.72	1.18	0,8
13	Jasa Perusahaan	5.10	4.71	1.46	0.39	6,1
14	Administrasi Pemerintahan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.15	3.76	2.83	1.33	916,8
15	Jasa Pendidikan	5.56	6.10	0.49	1.16	2,1
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	995.21	6.84	-0.10	4.35	5,0
17	Jasa Lainnya	5.23	6.16	-5.31	1.13	11,9
JUMLAH		4,86	-4,18	1,87	3,21	1.326,2

Sumber: BPS Kabupaten Sumbawa (Diolah Penulis, 2023)

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun

2018-2022 yang diukur dan dihitung melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan. Harga konstan dipergunakan di dalam penelitian karena PDRB atas harga konstan merupakan pengukuran PDRB melalui tahun dasar tertentu. PDRB atas harga konstan dipergunakan untuk melihat suatu pertumbuhan ekonomi suatu daerah setiap tahunnya dan PDRB atas harga konstan lebih cocok dijadikan data penelitian *time series* dalam melihat pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan tiga variabel yaitu variabel independent terdiri atas kemampuan keuangan daerah (X1), kemandirian keuangan daerah (X2) dan pertumbuhan ekonomi (Y) sebagai variabel dependen. Masing-masing pengaruh antar variabel akan dilihat melalui pengujian dan analisis yang dilakukan oleh penulis dengan menghitung rasio terlebih dahulu dan diinput dalam aplikasi SPSS.

3.4 Hasil Uji menggunakan Aplikasi SPSS

3.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan diolah berdistribusi normal atau tidak. Menurut Priyatno (2018:127) ada beberapa yang dapat digunakan untuk uji normalitas diantaranya P-P Plot Of Regression Standardized residual atau melalui uji One Sample Kolmogorov Smirnov. One Sample Kolmogorov Smirnov dasar pengambilan keputusannya yaitu apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 ($> 0,05$) maka nilai residual dari data dapat dikatakan berdistribusi normal.

Tabel 5.
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,12127706
Most Extreme Differences	Absolute	,292
	Positive	,252
	Negative	-,292
Test Statistic		,292
Asymp. Sig. (2-tailed)		,188 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Hasil Uji menggunakan SPSS

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan *One Sample Kolmogorov Smirnov* terlihat bahwa nilai

signifikansi adalah sebesar 0,188, berdasarkan pengambilan keputusannya bahwa apabila nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka nilai residual dari data dapat dikatakan berdistribusi normal.

3.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui kesalahan standar estimasi didalam model penelitian yang dilakukan. Uji yang digunakan yaitu dengan cara melihat nilai Tolerance dan Inflation Factor (VIF). Priyatno (2018:134), menjelaskan bahwa dasar pengambilan keputusan dari uji ini yaitu dengan memiliki nilai VIF (Variance Inflation Factor) kurang dari 10 (<10) dan memiliki angka Tolerance lebih dari 10 (>10) maka tidak terdapat unsur multikolinearitas. Adapun hasil uji unsur multikolinearitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 6.
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
		1	(Constant)	3,859			2,067	
	Kemampuan Keuangan Daerah	4,890	,553	1,935	8,838	,013	,167	8,942
	Kemandirian Keuangan Daerah	4,193	,347	2,642	12,068	,007	,167	8,942

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Hasil Uji menggunakan SPSS 26

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada data penelitian ini dengan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) sebesar 8,942 atau kurang dari 10 (<10) maka tidak terdapat unsur multikolinearitas dalam model.

3.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan suatu keadaan yang terjadi karena adanya ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Ada beberapa cara yang digunakan untuk uji ini diantaranya uji glejser dan scatterplots regresi. Dasar pengambilan keputusannya yaitu untuk uji glejser apabila nilai absolut residualnya lebih dari 0,05 ($>0,05$) maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Duwi Priyatno, 2018:136).

Adapun hasil uji unsur heteroskedastisitas dengan uji glejser pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Heteroskedastisitas merupakan suatu keadaan yang terjadi karena adanya ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Ada beberapa cara yang digunakan untuk uji ini diantaranya uji glejser dan scatterplots regresi. Dasar pengambilan keputusannya yaitu untuk uji glejser apabila nilai absolut residualnya lebih dari 0,05 ($>0,05$) maka tidak terjadi

heteroskedastisitas (Duwi Priyatno, 2018:136). Adapun hasil uji unsur heteroskeskedastisitas dengan uji glejser pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 7.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,859	2,067		1,866	,203		
	Kemampuan Keuangan Daerah	4,890	,553	1,935	8,838	,013	,167	8,942
	Kemandirian Keuangan Daerah	4,193	,347	2,642	12,068	,007	,167	8,942

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Hasil Uji menggunakan SPSS 26

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian telah diperoleh hasil nilai signifikansi untuk kemampuan keuangan daerah (X1) sebesar 0.719 dan untuk kemandirian keuangan daerah (X2) sebesar 0.370. Nilai tersebut lebih dari 0,05 ($>0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.3.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu dengan cara membandingkan hasil dari regresi dengan t tabel untuk uji parsial dan membandingkan hasil regresi dengan f tabel untuk pengujian simultan.

1. Kemampuan Keuangan Daerah (X1) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Tabel 9.
Hasil Uji t Variabel X1

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	870,728	,190		,478	,665
	Kemampuan Keuangan Daerah	65,141	175,930	,209	1,840	,436

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Hasil Uji menggunakan SPSS 26

Kriteria pengujianya adalah hipotesis satu dapat diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebaliknya apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis satu ditolak dan hipotesis nol diterima. Berdasarkan perhitungan output hasil SPSS di atas maka diperoleh t_{hitung} sebesar 15,790 dan t_{tabel} yang diperoleh dengan

$$t \text{ tabel} = t (a/2 : n-k-1)$$

$$a= 5\% =t (0,05/2 : 5-3-1)$$

$$=t (0,025 : 1)$$

$$=t (1,00)$$

Berdasarkan hasil perhitungan ttabel di atas, diperoleh nilai ttabel adalah 1,00 dan terlihat pada tabel tersebut bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan nilai thitung sebesar 1,840. Jadi dengan nilai 1,840 lebih besar (>) dari 1,00 sehingga dalam pengujian ini H nol ditolak dan H satu diterima serta untuk nilai signifikansinya adalah 0.000 atau lebih kecil dari (<) 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan daerah (X1) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

Hipotesis Pertama

H0 : $\beta_1 = 0$, artinya X1 (Kemampuan Keuangan Daerah) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). **Ditolak.**

H1 : $\beta_1 \neq 0$, artinya X1 (Kemampuan Keuangan Daerah) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). **Diterima.**

2. Kemandirian Keuangan Daerah (X2) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Tabel 10.
Hasil Uji t Variabel X2

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17,773	6,925		2,566	,083
	RES2	1,270	,550	-,800	2,311	,046

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Hasil Uji menggunakan SPSS 26

Berdasarkan perhitungan output hasil SPSS di atas maka diperoleh thitung sebesar 2,311 dan ttabel yang diperoleh dengan derajat kebebasan sebesar 32 dan tingkat signifikansi 0,05 dengan nilai yaitu 1,00. Jadi dengan nilai 2,311 > 1.00 sehingga dalam pengujian ini H nol ditolak dan H satu diterima serta untuk nilai signifikansinya adalah 0.006 atau lebih kecil dari (<) 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah (X2) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

Hipotesis Kedua

$H_0 : \beta_2 = 0$, artinya X_2 (Kemandirian Keuangan Daerah) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). **Ditolak.**

$H_1 : \beta_2 \neq 0$, artinya X_2 (Kemandirian Keuangan Daerah) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). **Diterima.**

3. Kemampuan Keuangan Daerah (X1) dan Kemandirian Keuangan Daerah (X2) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Tabel 11.
Hasil Uji F Variabel Independen X1 dan X2

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	64,657	2	26,023	110,331	,042 ^b
	Residual	47,857	9	5,236		
	Total	112,514	11			

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi
b. Predictors: (Constant), Kemampuan Keuangan Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: Hasil Uji menggunakan SPSS

Adapun rumus untuk mengetahui Ftabel menurut Rohmah & Ashlihah (2021) adalah $df_1 = k - 1$ dan $df_2 = n - k$, dimana nilai dari k ini merupakan jumlah variabel dan n adalah jumlah sampel. Jika mengikuti persamaan tersebut maka dalam penelitian ini $df_1 = 3 - 1 = 2$, dan $df_2 = 5 - 3 = 2$. Maka nilai Ftabel pada penelitian ini adalah 19,00.

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Fhitung adalah sebesar 110,331 dan nilai signifikansi sebesar 0.042. Nilai dari Fhitung yaitu sebesar 110,331 lebih besar (>) daripada Ftabel yaitu 19,00 ($110,331 > 19,00$) dan nilai signifikansinya adalah 0.042 lebih kecil (<) daripada 0.05. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Hipotesis Ketiga

$H_0 : \beta_3 = 0$, artinya X_1 (Kemampuan Keuangan Daerah) dan X_2 (Kemandirian Keuangan Daerah) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). **Ditolak.**

H 1 : $\beta_3 \neq 0$, artinya X1 (Kemampuan Keuangan Daerah) dan X2 (Kemandirian Keuangan Daerah) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi(Y). **Diterima.**

3.3.5 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui ada ataupun tidaknya pengaruh signifikan yang terjadi secara parsial ataupun simultan antara dua ataupun lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen (Duwi Priyatno, 2018). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara kemampuan keuangan daerah (X1) dan kemandirian keuangan daerah (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Adapun hasil uji regresi linier berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 8.
Hasil Uji Regresi Berganda (X1 dan X2 terhadap Y)

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,859	2,067		1,866	,203
	Kemampuan Keuangan Daerah	4,890	,553	1,935	8,838	,013
	Kemandirian Keuangan Daerah	4,193	,347	2,642	12,068	,007

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Hasil Uji menggunakan SPSS

Berdasarkan hasil pengujian dari SPSS tersebut, maka dapat diketahui persamaan dari regresi linier berganda adalah sebagai berikut.

$$Y = 3,859 + 4,890(X1) + 4,199(X2)$$

Hasil dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa nilai konstanta yang diperoleh adalah sebesar 3,859 atau 38,59%. Hal ini berarti bahwa pada saat variabel independen atau kemampuan keuangan daerah (X1) dan kemandirian keuangan daerah (X2) sama dengan 0, maka pertumbuhan ekonomi (Y) tetap naik sebesar 38,59%.

3.3.6 Koefisien Determinasi (*Adjusted R2*)

Woestho dkk (2020) menjelaskan bahwa suatu nilai koefisien determinasi akan menunjukkan seberapa besar dari kemampuan model regresi dalam menerangkan variabel dependen dalam penelitian. Horas Veryady (2019:124).

Adapun hasil dari perhitungan koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 12.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,995 ^a	,998	,979	,52809	,991	515,936	2	9	,000

a. Predictors: (Constant), Unstandardized Residual, Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: Hasil Uji menggunakan SPSS

Berdasarkan dari hasil uji SPSS 26 di atas, bahwa nilai dari koefisien determinasi pada tabel 4.18 maka diperoleh nilai adjusted R-square sebesar 0,979 (97,9%). Hal tersebut memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen sebesar 97,9%, sedangkan sisanya sebesar 2,1% dijelaskan oleh variabel lain selain variabel independen dalam penelitian.

Hasil dari perhitungan koefisien determinasi di atas menunjukkan bahwa antara variabel independen yaitu kemampuan keuangan daerah (X1) dan kemandirian keuangan daerah (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) sebagai variabel dependen memiliki kontribusi sebesar 97,9%. Berdasarkan hasil pengambilan keputusan jika nilai dari koefisien determinasinya lebih besar dari (>) 0,50 atau 50%, dapat dikatakan hasil ketepatan nilai dari koefisiennya tergolong tinggi.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini yang menjadi nilai koefisien determinasi pada variabel independen (Kemampuan Keuangan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah) dan variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi) memiliki hubungan yang kuat dan searah. Hal ini juga menunjukkan bahwa $100 - 97,9 = 2,1$ maka 2,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar daripada variabel independen dalam penelitian ini.

3.5 Penelitian Kemampuan Keuangan Daerah Di Kabupaten Sumbawa Belum Sepenuhnya Mampu Mendukung Otonomi Daerah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Didi Hermansyah, SE selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa. Sesuai dengan data pada website DJPK bahwa PAD Kabupaten Sumbawa turun drastis, terutama dari sektor lain-lain PAD yang sah turun hingga 26,5% dari tahun 2021 senilai 148,13 M turun ke 108,8 M ditahun 2022. Menurut beliau, penurunan PAD Kabupaten Sumbawa pada tahun 2022 ini disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya karena pasca pandemic covid-19 yang membawa dampak sangat besar bagi keuangan daerah, yang berdampak negatif terhadap penerimaan PAD dari beberapa sektor ekonomi yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi di Kabupaten Sumbawa seperti sektor pariwisata, perdagangan dan jasa. Kemudian beliau juga menambahkan, perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan nasional yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Hal ini berdampak negatif terhadap penerimaan PAD

dari sektor-sektor yang berkaitan dengan daya beli masyarakat, seperti sektor retribusi daerah. Serta kenaikan harga barang dan jasa menyebabkan peningkatan biaya operasional usaha. Hal ini berdampak negatif terhadap penerimaan PAD Kabupaten Sumbawa dari sektor-sektor yang berkaitan dengan usaha, seperti sektor retribusi daerah.

Faktor lainnya yang juga menyebabkan kemampuan keuangan di Kabupaten Sumbawa itu belum sepenuhnya mampu mendukung otonomi daerah adalah karena Kabupaten Sumbawa masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau provinsi untuk membiayai sebagian besar anggaran daerahnya.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil rasio kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa, jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang penulis cantumkan pada penelitian sebelumnya maka dengan variabel yang sama yaitu kemampuan keuangan daerah seperti penelitian yang dilakukan oleh Jalu Aji Prakoso dkk (2019) dengan judul “Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Jawa Tengah”, dimana hasil yang didapatkan yaitu kemampuan keuangan daerah di Jawa Tengah sebagian besar berada pada kategori sangat kurang dengan Kabupaten terendah yaitu Kabupaten Klaten dengan hasil rasio 5,626% dan untuk yang tertinggi yaitu Kabupaten Semarang dengan hasil rata-rata sebesar 13,124%. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan ini, untuk Kabupaten Sumbawa dengan kemampuan keuangan daerah juga tergolong masih kurang, kemampuan keuangan daerah terendah yaitu pada tahun 2018 dengan hasil 8,971% dan tertinggi pada tahun 2021 dengan hasil 12,361%. Berdasarkan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dengan variabel yang sama dengan penelitian terdahulu yaitu kemampuan keuangan daerah, nilai dari kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa ini masih memiliki hasil yang sama dalam kategori kemampuan keuangan daerah di Jawa Tengah yang mana masih tergolong rendah.

Hasil rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumbawa, jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang penulis cantumkan pada penelitian sebelumnya maka dengan variabel yang sama yaitu kemandirian keuangan daerah seperti penelitian yang dilakukan oleh Mutia Ayustin (2018) dengan judul “Kemandirian Keuangan Daerah Yang Dipengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2015-2017 (Pada Badan Pusat Statistik Jawa Barat)”, dimana hasil yang didapatkan yaitu rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah berada pada kategori masih rendah, dengan kemandirian keuangan terendah yaitu Kabupaten Pangandaran dengan persentase 52,4%. Sedangkan yang tertinggi sebesar 536,09%. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan ini, untuk Kabupaten Sumbawa dengan kemandirian keuangan daerah juga tergolong masih rendah pola hubungan instruktif, kemandirian keuangan daerah tertinggi yaitu pada tahun 2021 juga dengan hasil 14,875% dan terendah pada tahun 2018 dengan hasil 10,269%. Berdasarkan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dengan variabel yang sama dengan penelitian terdahulu, nilai dari kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumbawa ini masih memiliki kesenjangan yang jauh dengan daerah lainnya.

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (Opsional)

Penulis menemukan faktor yang mempengaruhi kemampuan dan kemandirian keuangan daerah yaitu berkaitan erat dengan tingginya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa, PAD akan menentukan kemampuan dan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumbawa terutama dalam rangka membiayai pembangunan daerah. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi ada banyak indikator dari pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa selain dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan. Selain itu, ada PDRB atas harga berlaku, pendapatan nasional dan modal. Seiring dengan meningkatnya kemampuan dan kemandirian keuangan daerah maka akan turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut yaitu:

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial antara kemampuan keuangan daerah sebagai variabel independen (X1) terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi (Y). Hal ini berarti bahwa Ketika kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan maka, akan diikuti dengan peningkatan dari pertumbuhan ekonomi begitu juga sebaliknya. Hal ini dibuktikan dengan nilai pada hasil uji t yang dilakukan yaitu $t_{hitung} 1,840 > t_{tabel} 1,00$ dan nilai sig. $0.436 < \alpha 0,05$. Sehingga dapat dinyatakan hipotesis H1 yang menyatakan bahwa “Kemampuan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi” diterima berdasarkan asumsi hipotesis sebelumnya.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial antara kemandirian keuangan daerah sebagai variabel independen (X2) terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi (Y). Hal ini berarti bahwa Ketika kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan maka, akan diikuti dengan peningkatan dari pertumbuhan ekonomi begitu juga sebaliknya. Hal ini dibuktikan dengan nilai pada hasil uji t yang dilakukan yaitu $t_{hitung} 2,311 > t_{tabel} 1,00$ dan nilai sig. $0.046 < \alpha 0,05$. Sehingga dapat dinyatakan hipotesis H2 yang menyatakan bahwa “Kemandirian Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi” diterima berdasarkan asumsi hipotesis sebelumnya.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan antara kemampuan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah sebagai variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji F yang dilakukan yaitu $F_{hitung} 110,331 > F_{tabel} 19,00$ dan nilai sig. $0.042 < \alpha 0,05$. Sehingga dapat dinyatakan hipotesis H3 yang menyatakan bahwa “Kemampuan Keuangan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi” diterima berdasarkan asumsi hipotesis

sebelumnya. Pengaruh variabel tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat kemampuan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah maka akan semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa.

Keterbatasan Penelitian. Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas penulis menyadari terdapat kekurangan dalam penelitian ini, mengenai Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, terkait dengan adanya keterbatasan dalam memperoleh data sekunder, dimana peneliti hanya memperoleh sebanyak 5 tahun yaitu dari tahun 2018-2022, namun diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih adanya kekurangan dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat memperluas penelitian dengan cara mempertimbangkan berbagai variabel lain yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi misalnya tingkat kemiskinan, pengangguran, pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan pada masa yang akan datang, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber data atau referensi dan rujukan untuk penelitian lebih lanjut berdasarkan informasi yang lebih lengkap dan lebih luas dan untuk tahun yang dijadikan sampel dalam penelitian agar lebih banyak dari dua belas tahun untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih maksimal.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada 1. Bapak Prof. Dr. Hadi Prabowo, MM selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bapak Dr. Halilul Khairi, M.Si selaku Dekan Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bapak Dr. Marja Sinurat, MM selaku Ketua Prodi Keuangan Publik Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Dosen Pembimbing Ibu Dr. Anindita Primastuti, SE., ME. Serta Kepala Badan Badan Keuangan Daerah (BKAD) Kabupaten Sumbawa beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Duwi Priyatno. (2018). SPSS:Panduan Mudah Olah Data bagi Mahasiswa dan Umum. CV Andi Offset.
- Penangsang, P., Studiviany, P., Dosen, A. T., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2022).
- Aji, J. ... Sugiharti, R. R. (2019). Analysis Of Regional Financial Capability And Independence Toward Economic Growth And Poverty In Central Java. Riset Ekonomi Pembangunan, 4(1).
<http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP>
- Hera, M. R. ... Novika. (2021). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Provinsi Di Pulau Jawa. Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Keuangan (Jabk), 8(2), 63–69.
- Ayustin, M. (2022). Kemandirian Keuangan Daerah Yang Dipengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2015-2017

- (Pada Badan Pusat Statistik Jawa Barat) . *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 61–72.
<https://doi.org/10.53429/jdes.v9ino.1.351>
- Penangsang, P., Studiviany, P., Dosen, A. T., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2022). Peranan APBD Sebagai Alat Ukur Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Kota Mojokerto Tahun 2019. Hasil Penelitian, 7(2).
- R. Agoes Kamaroellah. (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 14(1), 124–138.
- Woestho, C. ... Ekonomi, P. (2020). Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Jeneponto. In *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Vol. 6, Nomor 2).
- Tolosang, K. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(3), 79–92.
- Utari Handayani, T., & NR, E. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2348–2361.
- Badan Pusat Statistik. (2016). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Badan Pusat Statistik.
<https://www.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha-.html>
- Usman, H. (2021). Target PAD 2021 Naik 10,6 Milyar. *Mediasumbawa.com*.
<https://mediasumbawa.com/target-pad-2021-naik-106-milyar/>
- Undang-Undang RI. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 file:///D:/SKRIPSI/Jurnal/PP Nomor 12 Tahun 2019 (1).pdf (Nomor c).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Media Hukum*, 184.
- Undang-Undang RI. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 1-68.